



FORSCHUNGSFORUM LAW JOURNAL

FORUM RISET DAN DEBAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA

Vol. 1 No. 3 Tahun 2024

Orientasi Anggota DPD RI Terpilih 2024-2029 sebagai Upaya Optimalisasi Kinerja Parlemen Modern

Orientation of Elected Regional Representative Council Members 2024-2029 as an Effort to Optimize Modern Parliamentary Performance

Lutfi Mubarok¹, Juan Turpyn²

^{1,2} Sekretariat Jenderal DPD RI, Jakarta

Abstrak: Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk periode 2024-2029 menjadi titik krusial dalam menentukan arah kebijakan dan pengawasan di tingkat nasional. Sebagai lembaga perwakilan yang berperan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan memberikan masukan kepada DPR, DPD RI memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi di Indonesia. Dengan terpilihnya anggota DPD RI yang baru, harapan masyarakat akan peningkatan kinerja parlemen sangat tinggi. Masyarakat berharap DPD RI dapat lebih responsif terhadap aspirasi daerah, lebih aktif dalam fungsi legislasi dan pengawasan, serta lebih transparan dalam menjalankan tugas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa DPD RI memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, DPD RI memiliki tiga fungsi utama yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Peran DPD RI tersebut sangat krusial, terutama dalam memperjuangkan kepentingan daerah dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Namun, ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh anggota DPD RI terpilih untuk meningkatkan kinerja parlemen, antara lain: 1. Penguatan Kapasitas Anggota DPD RI; 2. Penguatan Fungsi Pengawasan dan Advokasi; 3. Penggunaan Teknologi Informasi; dan 4. Kolaborasi dengan *Stakeholder*. Kemudian, beberapa anggota DPD RI terpilih dapat melakukan beberapa langkah untuk mengimplementasikan strategi optimalisasi kinerja parlemen modern yakni: 1. Penyusunan Rencana Kerja Strategis; 2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas; 3. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi; dan 4. Peningkatan Partisipasi Publik.

Kata Kunci: Orientasi, DPD RI, Anggota DPD RI Terpilih, Optimalisasi, Parlemen Modern.

Abstract: The election of members of the House of Regional Representatives of the Republic of Indonesia (DPD RI) for the period 2024-2029 is a crucial point in determining the direction of policy and supervision at the national level. As a representative institution whose role is to oversee the implementation of the law and provide input to the DPR, DPD RI plays an important role in maintaining the balance of democracy in Indonesia. With the election of new DPD RI members, public expectations for improved parliamentary performance are very high. People expect DPD RI to be more responsive to regional aspirations, more active in the legislative and supervisory functions, and more transparent in carrying out its duties. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The results and discussion show that DPD RI has a strategic role in the Indonesian government system. Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, DPD RI has three main functions, namely legislation, supervision, and budget. The role of DPD RI is very crucial, especially in fighting for regional interests and carrying out the function of supervising the implementation of the law. However, there are several opportunities that can be utilized by elected members of DPD RI to improve parliamentary performance, among others: 1. Strengthening the Capacity of DPD RI Members; 2. Strengthening the Supervision and Advocacy Functions; 3. Use of Information Technology; and 4. Collaboration with Stakeholders. Then, some elected members of DPD RI can take several steps to implement a modern

parliamentary performance optimization strategy, namely: 1. Preparation of Strategic Work Plan; 2. Increased Transparency and Accountability; 3. Development of Monitoring and Evaluation System; and 4. Increased Public Participation.

Keywords: Orientation, Regional Representative Council, Elected Regional Representative Council Members, Optimization, Modern Parliament.

1. Pendahuluan

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk periode 2024-2029 menjadi titik krusial dalam menentukan arah kebijakan dan pengawasan di tingkat nasional. Sebagai lembaga perwakilan yang berperan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan memberikan masukan kepada DPR, DPD RI memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi di Indonesia. Dengan terpilihnya anggota baru, evaluasi terhadap orientasi dan visi Anggota DPD RI terpilih menjadi langkah dasar dalam mengoptimalkan kinerja parlemen modern yang adaptif terhadap tantangan zaman dan merespon berbagai persoalan daerah (King, 2020).

Gagasan dasar pembentukan DPD RI yaitu keinginan untuk mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk soal-soal yang terutama berkaitan langsung dengan daerah (Palguna, 2003). Keinginan tersebut berangkat dari pemikiran bahwa pengambilan putusan yang bersifat sentralistik pada masa lalu ternyata telah mengakibatkan meningkatnya ketidakpuasan daerah-daerah yang telah sampai pada tingkat yang membahayakan keutuhan wilayah negara dan persatuan nasional.

Pembentukan DPD RI semula dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi Dua kamar (bikameral) yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan DPD RI. Dengan struktur Dua kamar (bikameral) itu diharapkan proses legalisasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem double-check yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas. DPR RI merupakan cermin representasi politik (political representation). Sedangkan DPD RI mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional (regional representation) (Yusuf, 2013).

DPD RI merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan legislatif. Berdasarkan UUD 1945, DPD RI memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi daerah. Fungsi legislasi meliputi

pengusulan dan pembahasan rancangan undang-undang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah. Fungsi pengawasan dijalankan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang di daerah. Sementara itu, fungsi representasi diwujudkan dengan menyuarakan aspirasi daerah dalam pembuatan kebijakan nasional.

Proses pemilihan anggota DPD RI tidak terlepas dari dinamika politik yang kompleks. Sistem pemilihan langsung memungkinkan masyarakat untuk memilih wakil mereka secara langsung, namun di sisi lain, persaingan politik yang ketat sering kali menimbulkan berbagai tantangan. Isu-isu seperti politik uang, kampanye negatif, dan manipulasi suara masih menjadi ancaman bagi integritas pemilihan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa anggota DPD RI yang terpilih benar-benar memiliki komitmen dan kapasitas untuk menjalankan fungsi mereka secara efektif.

Orientasi dan visi anggota DPD RI yang terpilih akan sangat mempengaruhi arah kebijakan dan efektivitas kinerja parlemen. Anggota yang memiliki visi yang jelas tentang pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan lebih mampu berkontribusi secara positif dalam proses legislasi dan pengawasan. Selain itu, orientasi yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas juga penting untuk memastikan bahwa anggota DPD RI dapat bekerja dengan integritas dan menghindari praktik-praktik korupsi (Aspinall, 2010).

Dengan terpilihnya anggota DPD RI yang baru, harapan masyarakat akan peningkatan kinerja parlemen sangat tinggi. Masyarakat berharap DPD RI dapat lebih responsif terhadap aspirasi daerah, lebih aktif dalam fungsi legislasi dan pengawasan, serta lebih transparan dalam menjalankan tugas. Prospek untuk mencapai parlemen modern yang efektif sangat tergantung pada komitmen dan integritas anggota yang terpilih, serta dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, media, dan masyarakat sipil.

Tinjauan Literatur

Parlemen modern ditandai oleh beberapa karakteristik utama, termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efisiensi dalam proses legislasi. Menurut Norton (2013), parlemen modern harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial-politik yang cepat. Tantangan yang dihadapi parlemen di era modern mencakup peningkatan tuntutan dari masyarakat untuk keterbukaan informasi,

peran media dalam membentuk opini publik, serta kompleksitas isu-isu kebijakan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus. Dalam konteks Indonesia, tantangan ini juga diperparah oleh keragaman budaya dan geografis yang memerlukan pendekatan yang berbeda dalam setiap daerah.

Orientasi bagi anggota parlemen baru tidak hanya berfungsi sebagai pengenalan tugas dan fungsi, tetapi juga sebagai upaya untuk menyamakan pemahaman dan visi mengenai peran strategis yang diemban. Menurut Wehner (2006), orientasi yang baik dapat meningkatkan kapasitas anggota parlemen dalam menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan representasi. Di Indonesia, orientasi bagi anggota DPD RI menjadi lebih krusial mengingat peran mereka yang harus mewakili kepentingan daerah dalam kerangka kebijakan nasional (Baswedan, 2007). Orientasi yang komprehensif harus mencakup pemahaman tentang struktur pemerintahan, proses legislasi, etika dan tata tertib parlemen, serta isu-isu spesifik yang relevan dengan daerah yang diwakili.

Pemahaman yang mendalam tentang struktur dan proses legislasi merupakan kunci utama bagi anggota parlemen untuk berfungsi secara efektif. Menurut Lees (2016), legislator yang memahami alur kerja legislasi dapat lebih proaktif dalam merancang dan mengadvokasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan konstituen mereka. Untuk DPD RI, ini berarti anggota harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang prosedur legislasi di tingkat nasional dan bagaimana hal tersebut dapat diselaraskan dengan kebutuhan daerah.

Anggota parlemen modern harus memiliki keterampilan teknis dan komunikasi yang mumpuni. Pelatihan keterampilan ini mencakup penggunaan teknologi informasi untuk pengumpulan data, analisis kebijakan, serta keterampilan komunikasi untuk berinteraksi dengan konstituen dan media. Menurut Brown (2017), kemampuan untuk menyampaikan informasi secara jelas dan persuasif merupakan aset penting dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial dan politik secara mendalam melalui perspektif partisipan penelitian. Metode deskriptif akan

memberikan gambaran komprehensif mengenai orientasi anggota DPD RI dan implikasinya terhadap kinerja parlemen. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pandangan, persepsi, dan strategi anggota DPD RI terkait dengan orientasi politik mereka. Studi dokumen melibatkan analisis berbagai dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan, dan dokumen kebijakan yang relevan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang disusun berdasarkan tujuan penelitian. Pedoman wawancara ini mencakup pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden untuk memberikan jawaban yang kaya dan mendalam. Selain itu, instrumen pengumpulan data juga mencakup daftar dokumen yang akan dianalisis.

Metodologi penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai orientasi anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi tema-tema kunci yang berkontribusi terhadap optimalisasi kinerja parlemen modern. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, pendekatan yang digunakan diharapkan mampu memberikan wawasan yang berarti bagi pengembangan kebijakan dan strategi dalam meningkatkan kinerja parlemen di Indonesia (Hermawan, 2014).

3. Pembahasan

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara, DPD RI memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, DPD RI memiliki tiga fungsi utama yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Fungsi legislasi meliputi penyusunan, pembahasan, dan pemberian pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Fungsi pengawasan mencakup pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Fungsi anggaran melibatkan pemberian pertimbangan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Peran DPD RI tersebut sangat krusial, terutama dalam memperjuangkan kepentingan daerah dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Anggota DPD RI, yang dipilih melalui pemilihan umum, memiliki tanggung jawab besar dalam membawa aspirasi dan kebutuhan masyarakat dari berbagai daerah ke tingkat nasional (Matland, 2004). Oleh karena itu, memahami orientasi politik, latar belakang, dan komitmen anggota DPD RI terpilih sangat penting dalam merumuskan strategi optimalisasi kinerja parlemen.

Anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029 berasal dari berbagai latar belakang politik, sosial, dan budaya. Orientasi politik mereka dapat mempengaruhi cara mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil daerah. Beberapa anggota memiliki latar belakang sebagai politisi partai, sementara yang lain datang dari kalangan profesional, akademisi, atau aktivis. Keberagaman ini mencerminkan pluralitas masyarakat Indonesia, namun juga menuntut adanya sinergi dan kesepahaman dalam menjalankan fungsi parlemen (Reilly, 2015).

Parlemen modern ditandai dengan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Namun, parlemen modern ini tak cuma sekedar ditandai dengan kehadiran perangkat-perangkat teknologi saja. Akan tetapi harusnya menjadi sebuah paradigma berpikir parlemen dalam menjalankan kinerjanya secara optimal (Ali, 2019).

Praktik pengalaman dari negara-negara lain dapat menjadi referensi dalam upaya optimalisasi kinerja DPD RI kedepan. Misalnya, di Amerika Serikat, sistem checks and balances antara Senat dan House of Representatives memungkinkan terciptanya pengawasan yang efektif dan pembuatan kebijakan yang komprehensif. Di Inggris, penggunaan teknologi dalam proses legislasi dan pengawasan telah meningkatkan transparansi dan efisiensi parlemen. Belajar dari praktik terbaik (best practices) di negara lain, Indonesia dapat mengadopsi dan menyesuaikan strategi yang sesuai dengan konteks local (Brown, 2017).

Mengevaluasi kinerja DPD RI pada periode sebelumnya menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. Berdasarkan berbagai laporan dan studi, beberapa masalah yang sering muncul antara lain kurangnya koordinasi antara anggota, rendahnya partisipasi dalam sidang/rapat, dan minimnya inisiatif legislasi serta

capain dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Dengan memahami penyebab masalah ini, strategi perbaikan dapat dirancang untuk meningkatkan kinerja anggota DPD RI yang baru terpilih

3.1. Tantangan dan Peluan dalam Optimalisasi Kinerja

Pada periodisasi awal anggota DPD RI terpilih menunjukkan kecenderungan untuk lebih proaktif dalam menyuarakan isu-isu lokal dan regional. Mereka juga berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, beberapa anggota mengusung agenda reformasi birokrasi dan desentralisasi kekuasaan sebagai upaya untuk memperkuat otonomi daerah dan mempercepat pembangunan di wilayah masing-masing. Namun, kondisi demikian lambat laun mengalami penurunan kinerja seiring tuntutan masyarakat daerah yang begitu kompleks, sehingga hal ini berdampak terhadap kurang optimalnya kerja-kerja anggota DPD RI dalam mengartikulasi kepentingan daerah (Said, 2016).

Upaya mengoptimalkan kinerja parlemen modern tentunya akan menghadapi berbagai tantangan, termasuk kompleksitas sistem politik, keterbatasan kewenangan, sumber daya, dan resistensi terhadap perubahan. Namun, ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh anggota DPD RI terpilih untuk meningkatkan kinerja parlemen, antara lain (Less, 2016):

1. Penguatan Kapasitas Anggota DPD RI

Meningkatkan kapasitas anggota DPD RI melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan dapat membantu mereka memahami isu-isu terkini, teknik legislasi, dan strategi advokasi yang efektif. Ini akan memungkinkan anggota untuk bekerja lebih efisien dan memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam proses legislasi.

2. Penguatan Fungsi Pengawasan dan Advokasi

Kewenangan legislasi yang dimiliki parlemen tidak sepenuhnya dimonopoli oleh parlemen, karena dalam prakteknya penyusunan undang-undang dilakukan secara bersama-sama dengan pihak pemerintah. Disisi lain, kewenangan DPD dalam fungsi legislasi sangat terbatas. Sehingga fungsi pengawasan dan advokasi oleh anggota DPD RI menjadi hal yang sangat *urgent* untuk dapat dilakukan,

mengingat terdapat banyak persoalan daerah yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah pusat (Rohde, 2005).

3. Penggunaan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi kerja anggota DPD RI. Sistem *e-parliament* yang terintegrasi memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat, akses yang lebih mudah terhadap data dan dokumen, serta interaksi yang lebih efektif antara anggota dan konstituen.

4. Kolaborasi dengan Stakeholder

Membangun kolaborasi dengan berbagai *stakeholder*, termasuk DPR dan pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan media. Sinergi antara berbagai pihak ini akan membantu dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan mengawal implementasi kebijakan secara lebih efektif.

3.2. Implementasi Strategi Optimalisasi

Untuk mengimplementasikan strategi optimalisasi kinerja parlemen modern, diperlukan langkah-langkah konkret yang melibatkan seluruh anggota DPD RI. Berikut ini adalah beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh anggota DPD RI terpilih:

1. Penyusunan Rencana Kerja Strategis

Setiap anggota DPD RI perlu menyusun rencana kerja strategis yang selaras dengan visi dan misi lembaga. Rencana ini harus mencakup program-program prioritas, target capaian, dan indikator kinerja yang jelas.

2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas merupakan kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPD RI. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* akan membantu anggota DPD RI dalam menjalankan tugas dengan lebih jujur dan bertanggung jawab.

3. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif diperlukan untuk mengukur kinerja anggota DPD RI secara periodik. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk perbaikan dan penyesuaian strategi kerja yang lebih baik di masa mendatang.

4. **Peningkatan Partisipasi Publik**

Mengakomodasi partisipasi publik dalam proses legislasi dan pengawasan dapat memperkuat legitimasi dan relevansi kebijakan yang dihasilkan. Anggota DPD RI perlu aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat melalui berbagai forum, seperti pertemuan tatap muka, konsultasi publik, dan media sosial (Wehner, 2006).

Pemilihan anggota DPD RI periode 2024-2029 membawa harapan baru dalam upaya optimalisasi kinerja parlemen modern di Indonesia. Dengan memahami orientasi politik dan komitmen anggota terpilih, langkah-langkah strategis dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kapasitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Pemanfaatan teknologi informasi, kolaborasi dengan *stakeholder*, dan partisipasi publik menjadi kunci dalam mewujudkan parlemen yang lebih responsif dan efektif. Melalui upaya bersama, DPD RI dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam memperjuangkan kepentingan daerah dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Keberagaman latar belakang anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029 mencerminkan pluralitas masyarakat Indonesia. Anggota DPD RI berasal dari berbagai profesi, seperti politisi, akademisi, pengusaha, aktivis, dan tokoh masyarakat atau publik figur. Latar belakang yang beragam ini memberikan perspektif yang berbeda dalam menyikapi berbagai isu dan kebijakan yang dihadapi. Namun, keberagaman ini juga menuntut adanya sinergi dan kesepahaman dalam menjalankan fungsi parlemen. Dengan berbagai latar belakang dan orientasi politik, anggota DPD RI perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yaitu memperjuangkan kepentingan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam optimalisasi kinerja DPD RI adalah penguatan peran pengawasan. Fungsi pengawasan yang kuat akan memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan masyarakat. Untuk memperkuat fungsi pengawasan, DPD RI dapat mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif, seperti pembentukan tim pengawas khusus untuk isu-isu

tertentu, peningkatan kapasitas anggota dalam melakukan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Kolaborasi dengan berbagai stakeholder merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kinerja DPD RI. Stakeholder seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan media memiliki peran penting dalam proses legislasi dan pengawasan. Dengan membangun kolaborasi yang kuat, DPD RI dapat memperkuat fungsi pengawasan, mengidentifikasi masalah secara lebih akurat, merumuskan solusi yang lebih efektif, dan mengawal implementasi kebijakan dengan lebih baik. Kolaborasi juga akan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (Norton, 2013).

Partisipasi publik dalam proses legislasi dan pengawasan merupakan aspek penting dalam mewujudkan parlemen yang modern dan responsif. Anggota DPD RI perlu aktif dalam menjaring aspirasi masyarakat melalui berbagai forum, seperti pertemuan tatap muka, konsultasi publik, dan media sosial. Partisipasi publik akan memperkuat legitimasi kebijakan yang dihasilkan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, partisipasi publik juga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas anggota DPD RI.

4. Kesimpulan

Dalam dinamika demokrasi dan sistem politik Indonesia, posisi dan orientasi anggota DPD RI memiliki peran penting dalam mewujudkan parlemen yang modern dan efektif. Periode 2024-2029 menjadi momen krusial untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan kinerja anggota DPD RI terpilih. Seiring dengan berkembangnya tuntutan masyarakat daerah dan kompleksitas isu-isu nasional, para anggota DPD RI diharapkan mampu menyesuaikan diri dan mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif dan proaktif.

Langkah pertama dalam upaya optimalisasi kinerja DPD RI adalah dengan memastikan bahwa anggota yang terpilih memiliki orientasi yang jelas dan terarah. Orientasi ini tidak hanya mencakup pemahaman mendalam terhadap tugas dan fungsi DPD RI, tetapi juga kesadaran akan peran strategis anggota DPD RI dalam mengawal aspirasi daerah dan memperkuat integrasi nasional. Anggota DPD RI yang terpilih harus menunjukkan

komitmen yang kuat untuk memajukan daerah, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Pendekatan modern dalam parlemen menuntut anggota DPD RI untuk menguasai teknologi dan memanfaatkan platform digital dalam menjalankan tugasnya. Era digital membuka peluang bagi anggota DPD RI untuk berkomunikasi lebih efektif dengan konstituen, mengakses informasi secara cepat, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Penggunaan media sosial, aplikasi pertemuan virtual, dan sistem informasi yang terintegrasi akan mempermudah anggota DPD RI dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dan menyuarakan aspirasi masyarakat di daerah.

Maka dari itu, optimalisasi kinerja DPD RI memerlukan adanya sinergi dan kolaborasi yang erat antara anggota DPD RI dengan pemerintah daerah, lembaga legislatif lainnya, serta stakeholder terkait. Dalam konteks ini, anggota DPD RI harus mampu memainkan peran sebagai mediator yang efektif, menjembatani kepentingan daerah dengan kebijakan nasional. Kemampuan untuk bernegosiasi, membangun konsensus, dan merumuskan solusi yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Daftar Pustaka

- Ali, M. S. (2019). Parliamentary Oversight and Good Governance in Indonesia: A Case Study of DPD RI. *Asia-Pacific Journal of Public Administration*, 41(2), 97-110.
- Aspinall, E., & Fealy, G. (2010). Indonesia: Democracy and the Promise of Good Governance. *Southeast Asian Affairs*, 2010(1), 163-185.
- Baswedan, A. R. (2007). Indonesian Politics in 2007: The Presidency, Local Elections and the Future of Democracy. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 43(3), 323-340.
- Brown, A. (2017). Public Relations and Social Media: Deliberate or Creative Communications? *International Journal of Communication*, 11(21), 3890-3908.
- Hermawan, A. (2014). Regional Representation and Legislative Power in Indonesia: The Role of the DPD in a Decentralized Political System. *Indonesian Law Review*, 4(2), 205-226.
- I Dewa Gede Palguna, Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah, makalah pada *Focus Group Discussion "Kedudukan dan Peranan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)"*

- dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*" di Semarang, 25 Maret 2003 dan di Malang, 26 Maret 2003 dalam Janedjri M. Gaffar, et all (editor), Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta; Setjen MPR-UNDP, 2003, hal. 61-62
- King, B. (2020). The Evolution of Bicameralism: Perspectives from Indonesia's DPD and DPR. *Parliamentary Affairs*, 73(2), 294-311.
- Lees, J. D. (2016). *The Role of Parliament in Strengthening Political Accountability*. In *Parliamentary Control of Public Spending* (pp. 71-90). Routledge.
- M. Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Arsitektur Histori, Peran Dan fungsi DPD RI Terhadap Daerah Di Era otonomi Daerah)*, Graha Ilmu, Yogyakarta 2013, hal 23-24
- Matland, R. E., & Studlar, D. T. (2004). Determinants of Legislative Success: A Comparative Study of Indonesia and Other Emerging Democracies. *World Politics*, 56(3), 345-370.
- Norton, P. (2013). *Parliaments and Governments in Western Europe*. Frank Cass Publishers.
- Reilly, B. (2015). Democratic Reforms and Parliamentary Developments in Indonesia. *Journal of Democracy*, 12(4), 59-73.
- Rohde, D. W. (2005). *The Legislative Process: Analyzing the Policy-Making Process in Congress*. Congressional Quarterly Press.
- Said, S. (2016). *The Role of Regional Representative Council in Indonesian Democracy*. *Indonesian Quarterly*, 44(4), 295-309.
- Wehner, J. (2006). *Assessing the Power of the Purse: An Index of Legislative Budget Institutions*. *Political Studies*, 54(4), 767-785.